

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk memperbaiki segi perekonomian rakyat peninggalan kolonial. Usaha perbaikan ekonomi ditempuh melalui usaha pengalihan sistem ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ekonomi kolonial di Indonesia dikatakan oleh Mackie memiliki karakteristik sebagai berikut.

The colonial economy was characterised by extremely low wages and costs; by high efficiency in the plantation sector and heavy investments (mainly Dutch-owned) in mining and tertiary activities, such as trading services and communications; and above all by stable currency sistem and a remarkable ability to adjust to changess in world market conditions (Mackie dalam Glassburner, 1971: 16).

Artinya:

Ekonomi kolonial memiliki karakteristik yaitu upah dan ongkos yang sangat rendah, efisiensi tinggi di sektor perkebunan dan juga investasi yang besar oleh perusahaan-perusahaan Belanda di sektor pertambangan dan jasa-jasa seperti perdagangan dan komunikasi, selain sitem mata uang yang stabil dan kemampuan yang besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi dunia.

Titik awal transformasi dari ekonomi kolonial ke arah ekonomi nasional terjadi pada tahun 1950 dibawah kabinet Natsir. Kabinet Natsir meskipun hanya berumur 6 bulan (September 1950-Maret 1951) namun dianggap sebagai kabinet yang paling berdedikasi dalam menangani masalah ekonomi. Dianggap berdedikasi karena kabinet ini melakukan usaha pengetatan anggaran untuk menghindari inflasi. Kabinet Natsir dengan Sjafruddin Prawira Negara sebagai

menteri keuangan dan Sumitro sebagai menteri perdagangan juga telah menghasilkan berbagai kebijakan yang bersifat nasionalistis seperti *Rencana Urgensi Ekonomi*. Namun upaya-upaya yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir pada akhirnya juga mengalami berbagai halangan berupa persyaratan yang berat dan juga munculnya berbagai gejolak dari dalam maupun luar negeri (Soesastro, 2005: 19).

Pada periode Kabinet Djuanda, Indonesia mengalami defisit anggaran yang membengkak, memuncaknya masalah Irian Barat dan juga munculnya usaha-usaha pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda (Nasionalisasi) yang bermula dari pemogokan oleh para pekerja perusahaan Belanda (Budiman dalam Soesastro, 2005: 22). Kondisi Indonesia pada periode tahun 1950-1959 ditandai juga oleh munculnya berbagai permasalahan baik ekonomi, sosial terlebih pada politik menghadapi masalah ekonomi dan keuangan yang buruk, cadangan devisa yang semakin menurun, ekspor minim, produksi rendah, kondisi tersebut diperburuk oleh tindakan beberapa daerah yang melakukan perdagangan atau barter langsung dengan pihak luar (Budiman dalam Soesastro, 2005: 15). Puncak dari permasalahan tersebut kemudian ditembus dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal periode pemerintahan yang baru yaitu periode Demokrasi Terpimpin.

Pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" secara tegas dikatakan bahwa sistem Liberal harus ditinggalkan dan menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin dan disertai Ekonomi Terpimpin. Soekarno lebih lanjut menguraikan ideologi Demokrasi

Terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik) yang oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara diusulkan untuk dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Soekarno juga menyerukan agar dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial dan perlengkapan kembali lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan, seperti dikatakan oleh Ricklefs bahwa.

Pada awal tahun 1960, kaidah yang samar-samar itu menjadi semakin rumit karena ditambahkannya kata USDEK, yang berarti UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK merupakan definisi resmi dari ortodoksi ideologi (Ricklefs, 2005: 527).

Salah satu slogan dalam masa Demokrasi Terpimpin ialah Ekonomi Terpimpin yang dalam pelaksanaannya Hatta melihat besarnya peranan pemerintah secara langsung dan tak langsung dalam ekonomi yang pada akhirnya nanti dikhawatirkan sebagai salah satu kelemahan pemerintah yang akan menyebabkan ekonomi menjadi tambah kocar-kacir, rakyat menderita karena inflasi yang hebat. Ekonomi Terpimpin lebih lanjut dikatakan oleh Hatta erat sekali hubungannya dengan ekonomi berencana (*planned economy*) yang teori-teorinya banyak dikemukakan oleh komunisme (Noer, 1990: 543).

Ekonomi Terpimpin mendasarkan dirinya pada paham sosialisme yang khas Indonesia. Dikatakan oleh Deliar Noer (1990: 539) bahwa mungkin dikarenakan tekanan Soekarno pada kepribadian Indonesia seperti yang coba ia kemukakan dalam rangka Demokrasi Terpimpin, maka juga dalam kehidupan ekonomi serta sosial penamaan Sosialisme Indonesia semakin tenar.

Ekonomi Terpimpin yang mendasarkan dirinya pada sosialisme ala Indonesia dikatakan oleh Soekarno sebagai bentuk pengembangan dari Marhaenisme. Marhaenisme adalah gagasan yang dikemukakan oleh Soekarno dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil didalam proses perjuangan kemerdekaan. Lebih lanjut kaum Marhaen ini diharapkan menjadi komponen utama dalam revolusi melawan kolonialisme dan dalam menciptakan suatu masyarakat baru yang lebih adil (Wardaya, 2000: 43-44).

Ekonomi Terpimpin juga berarti dominasi yang kuat atau campur tangan yang kuat dari pemerintah terhadap kehidupan perekonomian yang dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sistem ini menurut Gunadi (1985 : 346-347) memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Politik sebagai panglima, dimana semua masalah kehidupan sosial dan ekonomi hendak dipindahkan secara politis.
2. Penguasaan ekonomi oleh pemerintah, baik itu dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.
3. Membesarnya sektor pemerintah sejalan dengan berkembangnya gerakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik Belanda yang menjurus kearah etatisme.
4. Pengendalian negara melalui komando dan ancaman sanksi dan perundangan yang dibuat oleh penguasa.

Tindak lanjut dari diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan Manipol USDEK sebagai ideologi baru di Indonesia maka pemerintahpun mulai melaksanakan sistem Ekonomi Terpimpin yang kemudian dilaksanakan oleh beberapa kabinet, yaitu:

1. Kabinet Kerja I (10 Juli 1959-18 Februari 1960)
2. Kabinet Kerja II (18 Februari 1960-6 Maret 1962)

3. Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963)
4. Kabinet Kerja IV (13 November 1963-27 Agustus 1964)
5. Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964-20 Februari 1966)
6. Kabinet Dwikora yang disempurnakan (20 Februari 1966-11 Maret 1966)
7. Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi (27 Maret 1966-24 Juli 1966)

Pelaksanaan berikutnya dari Ekonomi Terpimpin yaitu pada tahun 1958 dibentuk Depernas (Dewan Perancang Nasional) untuk menyusun rencana pembangunan nasional secara menyeluruh dengan Mr. Muhammad Yamin sebagai ketuanya. Depernas dibentuk oleh Presiden Soekarno tanpa melibatkan para ekonom dalam membuat suatu rencana pembangunan dan industrialisasi yang sangat ambisius. Rencana Depernas ini dimaksudkan juga untuk mengantarkan secara terpimpin masyarakat Indonesia yang menonjol di bidang agrarisnya ke arah masyarakat agraria modern dengan mekanisasi yang penuh dengan perindustrian. dan pula dengan ditebarkan ke seluruh Indonesia, rencana ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertinggi ketahanan militer strategi kita (Abdulgani, 1965: 54).

Tahun 1963 Depernas diganti dengan dengan Bappenas (Badan Perancang Pembangunan Nasional) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dimana menurut landasan pembentukannya Bappenas mempunyai tugas menyusun rencana tahunan secara jangka panjang, baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan (Poesponegoro, 1993: 322).

Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin maka semua kebijakan ada ditangan Soekarno termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan

dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Seperti pada kasus pendirian Bank Tunggal Milik Negara melalui penetapan Presiden no 7 tahun 1965 yang oleh Presiden Soekarno dianggap perlu dilakukan untuk mengintegrasikan semua Bank Negara kedalam suatu organisasi Bank Sentral tidak hanya dalam satu instansi. Pendirian Bank Tunggal didasarkan atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan doktrin revolusi Indonesia yang bertugas untuk menjalankan aktivitas-aktivitas Bank Sentral. meskipun kemudian pada akhirnya Bank Tunggal itupun kemudian dibubarkan pada tahun 1968 (Poesponegoro, 1993: 325-326).

Perkembangan selanjutnya. Ekonomi Terpimpin yang digagas oleh Soekarno melalui rencana-rencana pembangunannya seperti program pengguntingan uang atau sanering, Dekon (Deklarasi Ekonomi), program Berdikari (Berdiri Diatas kaki Sendiri) dan serangkaian peraturan-peraturan moneter yang pada dasarnya dilaksanakan dalam upaya membendung inflasi yang terjadi pada masa itu. Namun, rencana-rencana pembangunan di atas pun kemudian pada ahirnya mengalami kegagalan dan pada akhirnya ikut mengakibatkan terjadinya kesulitan liquiditas, baik itu di sektor negara (Pemerintah) maupun swasta.

Kegagalan dari berbagai rencana pembangunan itu pada dasarnya lebih dikarenakan Pemerintah pada saat itu tidak mempunyai kemauan yang kuat dan tegas untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya secara efektif. Pengeluaran negara lebih banyak digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan politik (proyek-proyek pertahanan dan keamanan seperti Operasi Ganyang Malaysia, Operasi Pembebasan Irian Barat dan lainnya) dan kepentingan

prestise (penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Ganefo atau *Games of The New Emerging Force* dan Conefo atau *Conference of The New Emerging Force*) yang tidak menghasilkan barang apalagi menghasilkan kesejahteraan rakyat banyak.

Berbagai rencana pembangunan yang dilaksanakan pada masa itupun kemudian semakin kandas oleh adanya penyelewengan politik, korupsi, inflasi yang merajalela dan adanya politik konfrontasi. Walaupun pemerintah kemudian menyadari kegagalannya dan hendak mengatasinya dengan beralih pada hal yang lain seperti dengan adanya Deklarasi Ekonomi yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, namun usaha tersebut tidak berjalan bahkan tidak berhasil dilaksanakan sama sekali hingga akhir tahun 1966.

Ekonomi Terpimpin kemudian meninggalkan kehidupan ekonomi yang sangat kacau dengan inflasi yang tinggi, cadangan devisa dengan saldo yang negatif dan melonjaknya harga-harga barang kebutuhan yang diakibatkan oleh sistem ekonomi yang lebih menomor-satukan politik dibandingkan dengan usaha-usaha untuk mensejahterakan rakyat melalui rehabilitasi ekonomi. Periode Ekonomi Terpimpin dianggap sebagai periode gelap dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dimana suasana nasional dipenuhi dengan semangat revolusioner yang sama sekali tidak mengindahkan kaidah-kaidah ekonomi (Budiman dalam Soesastro, 2005: 15). Akibatnya Ekonomi Terpimpin kemudian mewariskan perekonomian yang carut-marut bagi pemerintah periode selanjutnya (Orde Baru), yang kemudian dijawab oleh Pemerintah Orde Baru dengan program-program stabilisasi ekonomi yang berhasil menekan inflasi hingga 120% pada tahun 1967

dan melakukan perubahan dari sistem Ekonomi Terpimpin menjadi demokrasi ekonomi.

Berdasarkan uraian singkat mengenai pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan pengaruh atau dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1967, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Ekonomi Terpimpin: Tinjauan Pelaksanaan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1957-1967)".

Pemilihan permasalahan mengenai Ekonomi Terpimpin pada masa Demokrasi Terpimpin dikarenakan penulis tertarik untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa besar yang ada pada masa Demokrasi Terpimpin yang memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan Indonesia saat itu. Penulis juga ingin mengetahui mengenai pelaksanaan dari Ekonomi Terpimpin dan juga dampak-dampak yang muncul dari dilaksanakannya Ekonomi Terpimpin tersebut oleh pemerintah baik itu berupa dampak positif atau dampak negatif yang berkenaan dengan perekonomian rakyat Indonesia.

Kajian mengenai perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang mengkaji pelaksanaan Ekonomi Terpimpin belum pernah dikaji di UPI, khususnya di Jurusan Pendidikan Sejarah. Hal tersebut juga menjadi faktor pendorong penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, sedangkan kurun waktu yang dipilih yakni dari tahun 1959-1967. Tahun 1959 ditetapkan sebagai permulaan dilaksanakannya gagasan mengenai Demokrasi Terpimpin dalam bidang politik melalui dekrit Presiden dan munculnya gagasan Ekonomi Terpimpin dalam bidang ekonomi, sedangkan tahun 1967 penulis gunakan

sebagai tahun awal masa pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru (Orde Baru) yang ditandai oleh adanya penanaman modal asing pada tahun tersebut.

I.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang dikemukakan yaitu "Bagaimana pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia tahun 1959-1967?" Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Ekonomi Terpimpin?
2. Apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan Ekonomi Terpimpin di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan Ekonomi Terpimpin pada tahun 1959-1967?
4. Bagaimana dampak dari pelaksanaan Ekonomi Terpimpin terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1959-1967?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan, maka penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk:

1. Mengetahui pengertian dari Ekonomi Terpimpin baik itu secara arti (definisi) maupun maksud yang terkandung dalam Ekonomi Terpimpin itu sendiri.
2. Memperoleh gambaran mengenai latar belakang munculnya konsep Ekonomi Terpimpin di Indonesia, yang di dalamnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi sebelum adanya konsep Ekonomi Terpimpin dan usaha-usaha dalam rangka perintisan menuju munculnya ide-ide Ekonomi Terpimpin.
3. Menganalisis pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang meliputi perkembangannya dari tahun 1959-1967 dan peranan pemerintah dalam pelaksanaan ide Ekonomi Terpimpin di Indonesia.
4. Menganalisis dampak yang muncul dari pelaksanaan Ekonomi Terpimpin terhadap perekonomian di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967).

Selain itu, tujuan penulisan ini juga diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu sejarah, baik itu sejarah nasional maupun sejarah ekonomi. Pembahasan mengenai Ekonomi Terpimpin dapat dikategorikan ke dalam sejarah nasional, karena dapat memberikan dampak yang luas terhadap negaram, dan bisa dikategorikan sebagai sejarah ekonomi karena dapat memberikan dampak terhadap segi ekonomi terutama sejarah perekonomian negara. Sehingga

ditulisnya kajian mengenai pelaksanaan Ekonomi Terpimpin di Indonesia sebagai sebuah karya ilmiah. diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu sejarah.

1.4 Penjelasan Judul

Judul yang penulis angkat adalah “Ekonomi Terpimpin (Suatu Tinjauan Pelaksanaan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1967)”. Penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Ekonomi Terpimpin

Ekonomi Terpimpin menurut Hatta (Noer, 1990: 543) erat sekali hubungannya dengan ekonomi berencana (*planned economy*). Ekonomi Terpimpin bisa diartikan juga sebagai suatu strategi ekonomi (Manipol) dengan tekad (retoris) untuk merombak struktur ekonomi yang ada dan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur (dalam Ensiklopedi Populer Politik, 1991: 288).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb (Alwi, 2002: 627).

3. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah corak pemerintahan yang untuk pertama kalinya dipakai secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 ketika membuka Konstituante, yaitu corak demokrasi yang

mengenal satu pimpinan menuju tujuan suatu masyarakat berkeadilan sosial (Marbun, 2005: 116).

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

A. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode historis yang merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah. Metode adalah prosedur, teknik atau cara-cara sistematis dalam melakukan suatu penyelidikan (Sjamsuddin, 1996: 60) sedangkan menurut Gotschalk (1986: 32), metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis, rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode historis merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian sejarah, karena data-data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari masa lampau.

Adapun beberapa tahapan dalam penelitian sejarah ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah, menurut Ismaun (1992: 125-136), mengandung empat tahapan penting, yaitu.

1. Heuristik (Pengumpulan sumber-sumber sejarah)

Heuristik yaitu tahapan dimana setelah sejarawan menetapkan topik dan masalah untuk penelitiannya dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam tahap pertama ini adalah mencari sumber yang berhubungan dengan kajian seperti buku, surat kabar dan artikel.

2. Kritik atau Analisis Sumber (Menilai Sumber Sejarah)

Kritik sejarah atau kritik sumber adalah metode untuk menilai sumber yang kita butuhkan untuk mengadakan penulisan sejarah. Penilaian sumber sejarah terdiri dua aspek, yaitu aspek eksternal dan internal. Kritik eksternal dipergunakan untuk meneliti otentisitas dan integritas sumber-sumber yang diperoleh. Sedangkan kritik internal dipergunakan untuk menilai aspek isi (*content*) sumber dan untuk mengetahui reliabilitas dan kredibilitas isi dari sumber yang telah didapat. Hal tersebut dilakukan agar fakta-fakta yang disajikan bersifat valid dan objektif, serta untuk mencari kebenaran, sehingga dapat membedakan fakta yang benar dan yang palsu maupun fakta yang mungkin dan meragukan.

3. Interpretasi (Menafsirkan Sumber Sejarah)

Interpretasi adalah menafsirkan keterangan dari sumber sejarah berupa fakta dan data yang terkumpul dengan cara dirangkai dan dihubungkan sehingga tercipta penafsiran sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu pelaksanaan Ekonomi Terpimpin pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1967.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi disebut juga penulisan sejarah, dimana sumber sejarah yang ditemukan kemudian dianalisis dan ditafsirkan lalu ditulis secara jelas dengan gaya bahasa yang sederhana serta tata cara penulisan ejaan yang baik dan benar menjadi suatu kisah sejarah yang selaras atau cerita ilmiah dalam tulisan berbentuk karya tulis (Skripsi) "Ekonomi Terpimpin

(Tinjauan Pelaksanaan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia tahun 1959-1967)".

B. Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan, yaitu dengan menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan dengan jalan mempelajari buku, dokumen atau sumber tulisan lain yang berhubungan dan mendukung terhadap masalah penelitian. Melalui studi literatur digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta atau teori-teori yang relevan dengan masalah yang penulis kaji. Setelah sumber literatur terkumpul kemudian penulis mengkaji dan mempelajari fakta-fakta yang ditemukan apakah relevan atau tidak.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun menurut sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan pokok pikiran yang dibahas dalam skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode dan teknik penulisan serta sistematika penulisan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu sejarah.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan mengenai hasil tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1959-1967. Uraian tinjauan kepustakaan ini meliputi pemaparan beberapa sumber kepustakaan dan

penjelasan konsep-konsep yang berhubungan untuk mendukung permasalahan yang dikaji.

Bab III Metode dan Teknik Penelitian, dalam bab ini dibahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber serta analisis dan cara penulisannya. Dalam bab ini dipaparkan mengenai penggunaan metode historis, sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik studi literatur yang disesuaikan dengan disiplin ilmu sejarah.

Bab IV Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Tahun 1959-1967, pada bab ini diuraikan penjelasan dan analisis dari hasil penelitian berkaitan dengan permasalahannya yang dikaji dalam rumusan masalah pada bab I. Melalui analisis fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian, di antaranya mengenai pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang dimulai dari penjelasan mengenai pengertian Ekonomi Terpimpin, latar belakang terjadinya Ekonomi Terpimpin dan kondisi perekonomian rakyat pada masa pelaksanaan Ekonomi Terpimpin pada tahun 1959-1967 di Indonesia.

Bab V Dampak Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Terhadap Perekonomian Indonesia pada Tahun 1959-1967, pada bab ini akan dijelaskan mengenai dampak-dampak yang kemudian muncul sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan Ekonomi Terpimpin oleh pemerintah Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno pada tahun 1959-1967 di Indonesia serta pengaruhnya terhadap sendi-sendi perekonomian rakyat ataupun negara. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai

upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1967 guna mengatasi kemerosotan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Bab VI Kesimpulan, dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan mengenai Ekonomi Terpimpin pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) dan dampak-dampak yang kemudian muncul dari pelaksanaan Ekonomi Terpimpin terhadap perekonomian rakyat Indonesia pada tahun 1959-1967. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi.

